

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian oleh *Human Rights Watch* pada tahun 2017, mendokumentasikan pola pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia dalam kebijakan *War on Drugs* di Filipina. Laporan ini mengungkap bahwa polisi sering kali membunuh tersangka narkoba tanpa proses hukum dan melabeli mereka sebagai korban temuan atau kematian dalam penyelidikan. *Human Rights Watch* juga mencatat bahwa laporan resmi polisi sering kali bertentangan dengan kesaksian saksi mata yang menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai tindakan eksekusi dingin. Penelitian ini menggunakan strategi *information politics* untuk menyebarkan informasi terkait pelanggaran HAM dan *accountability politics* untuk menuntut pemerintah Filipina bertanggung jawab atas kebijakan tersebut (York, n.d.) .

Human Rights Watch mendesak PBB untuk melakukan investigasi independen terhadap pembunuhan yang terjadi selama kebijakan *War on Drugs*. Mereka mengklaim bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, mengingat skala dan sistematisnya pelanggaran yang terjadi. Laporan ini menjadi salah satu dokumen kunci yang digunakan oleh organisasi Hak Asasi Manusia untuk mendesak komunitas internasional agar lebih aktif dalam menanggapi situasi Hak Asasi Manusia di Filipina.

Secara keseluruhan, laporan *Human Rights Watch* pada tahun 2017 memberikan gambaran menyeluruh tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Filipina akibat kebijakan *War on Drugs*. Melalui dokumentasi yang cermat dan analisis mendalam, *Human Rights Watch* berupaya untuk meningkatkan kesadaran global mengenai situasi kritis ini dan mendorong tindakan internasional untuk menghentikan kekerasan serta memastikan akuntabilitas bagi pelanggar Hak Asasi Manusia.

Penelitian oleh Salasmita pada tahun 2022 menganalisis tindakan pembunuhan di luar hukum, yang dilakukan selama implementasi kebijakan *War on Drugs*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Peneliti juga menyoroti peran mahkamah pidana internasional atau (ICC) dalam menuntut pertanggung jawaban Presiden Duterte atas pelanggaran ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal untuk menganalisis yurisdiksi internasional terhadap situasi tersebut.

Penelitian ini mencatat bahwa pemerintahan Filipina telah memberikan intensif kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pengguna narkoba, dengan imbalan finansial bagi setiap orang yang terbunuh dalam operasi penegakan hukum. Hal ini semakin memperburuk situasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di negara tersebut, di mana banyak korban adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam aktivitas kriminal (Salasmita et al., 2022).

Salasmita menggaris bawahi bahwa meskipun ada upaya dari komunitas internasional untuk menanggapi situasi ini, termasuk seruan untuk penyelidikan independen, banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah Duterte cenderung menolak kritik internasional dan mempertahankan kebijakannya sebagai langkah untuk melindungi keamanan publik dari ancaman narkoba (Salasmita et al., 2022).

Amnesty internasional melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul "*If You Are Poor, You Are Killed: Extrajudicial Execution in the Philippines 'War on Drugs'*" yang mendokumentasikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang luas dalam konteks kebijakan *War on Drugs* yang ditetapkan oleh Presiden Duterte, Amnesty melakukan wawancara kepada 110 responden, termasuk saksi mata, keluarga korban, dan anggota kepolisian untuk mendokumentasikan 33 kasus pembunuhan terkait kebijakan *War on Drugs*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban berasal dari kalangan masyarakat miskin, termasuk anak – anak, yang menjadi sasaran utama kebijakan ini. Amnesty Internasional menyimpulkan bahwa kebijakan Duterte secara

sistematis melanggar Hak Asasi Manusia dan menyerukan investigasi independen serta akuntabilitas internasional (Amnesty International, 2017).

Amnesty Internasional juga mengkritik pemerintah Filipina karena menolak untuk mengakui adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kampanye ini. Dalam konteks ini, laporan tersebut menyerukan kepada komunitas internasional untuk menuntut akuntabilitas dan mendesak penyelidikan independen terhadap pelanggaran yang terjadi. Amnesty menekankan pentingnya tindakan dari badan – badan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan kampanye *War on Drugs* (Amnesty International, 2017).

Laporan 2017 ini menjadi salah satu referensi penting dalam diskusi global mengenai Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum di Filipina. Dengan bukti – bukti yang kuat dan dokumentasi yang cermat, Amnesty internasional berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan situasi kritis ini dan mendorong tindakan internasional untuk menghentikan kekerasan serta memastikan keadilan bagi korban.

Analisis OHCHR menyoroti dampak kebijakan *War on Drugs* terhadap kelompok rentan, termasuk anak – anak, masyarakat miskin di Filipina. Penelitian ini mencatat bahwa mayoritas pembunuhan dilakukan tanpa proses peradilan yang adil, sehingga memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. OHCHR juga menekankan pentingnya peran organisasi internasional dalam mendesak pemerintah Filipina untuk menghentikan kebijakan represif ini dan mematuhi standar Hak Asasi Manusia global .

Dalam laporan tersebut, OHCHR mengidentifikasi bahwa kebijakan ini telah menyebabkan ribuan kematian di luar proses hukum. OHCHR menekankan pentingnya penyelidikan independen terhadap pelanggaran yang terjadi dan menyerukan kepada pemerintah Filipina untuk menghentikan praktik – praktik kekerasan serta memastikan akuntabilitas bagi pelaku. Laporan ini juga mencakup rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia dan

mendukung upaya reformasi dalam sistem peradilan (Rakhmawulan & Nuraeni, 2021).

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa OHCHR memiliki mandat untuk mempromosikan dan melindungi semua Hak Asasi Manusia secara global. Dalam konteks Filipina, OHCHR berupaya untuk memperkuat sistem perlindungan Hak Asasi Manusia melalui dialog dengan pemerintah dan lembaga – lembaga terkait. Laporan ini menjadi salah satu referensi paling penting dalam memahami peran OHCHR dalam menanggapi pelanggaran Hak Asasi Manusia di negara - negara yang mengalami krisis (Rakhmawulan & Nuraeni, 2021).

Penelitian oleh Alexander Wendt dalam bukunya “*Social Theory of Internasional Politics*” mengembangkan argumen bahwa struktur internasional bukan hanya mengembangkan argumen bahwa struktur internasional bukan hanya ditentukan oleh ide – ide dan identitas yang dibagikan antar negara. Wendt berpendapat bahwa identitas dan kepentingan negara terbentuk melalui interaksi sosial dan norma – norma yang ada. Penelitian ini memberikan dasar bagi pemahaman konstruktivisme dalam hubungan internasional, menekankan bahwa tindakan negara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan rasional tetapi juga oleh bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri dan orang lain dalam konteks global. Wendt menekankan bahwa identitas dan kepentingan negara terbentuk melalui interaksi sosial dan norma – norma yang ada. Dalam pandangannya, kepentingan nasional bukanlah sesuatu yang tetap dan ditentukan oleh faktor material semata, melainkan dibentuk oleh ide – ide yang dibagikan di antara aktor – aktor internasional (Wendt, 2005).

Dengan demikian, perubahan dalam identitas kolektif suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan tindakan mereka di panggung global. Selain itu, Wendt juga menjelaskan 4 faktor yang dapat mendorong perubahan struktural dari satu budaya ke budaya lainnya : saling ketergantungan (*interdependence*), nasib bersama (*common fate*), homogenisasi (*homogenization*), dan pengendalian diri (*self – restraint*). Wendt berargumen bahwa dinamika ini dapat menghasilkan perubahan dalam cara negara – negara

berinteraksi dan memahami posisi mereka satu sama lain dalam sistem internasional. Wendt mengkritik pendekatan realisme dan liberalisme yang dominan pada saat itu karena terlalu menekankan pada motivasi material dan individualis. Ia menyatakan bahwa untuk memahami hubungan internasional secara lebih komperhesif, penting untuk mempertimbangkan bagaimana ide – ide dan norma – norma sosial membentuk perilaku negara.

Dalam buku “*The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*”, Katzenstein pada tahun 1996 menekankan pentingnya budaya dan identitas dalam membentuk kebijakan keamanan nasional. Ia mengklaim bahwa identitas kolektif suatu negara, yang dibangun melalui sejarah dan norma sosial, mempengaruhi cara negara tersebut merespons ancaman keamanan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana konstruktivisme dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri dan keamanan, dengan fokus pada peran budaya dalam menentukan perilaku negara.

Katzenstein menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks budaya ketika menganalisis kebijakan keamanan. Mereka berpendapat bahwa pemahaman tentang identitas kolektif suatu negara dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai keputusan – keputusan kebijakan luar negeri yang diambil (Katzenstein, 1996).

Penelitian oleh Martha Finnemore tahun 1996 dalam karya bukunya yang berjudul “*National Interests in Internasional Society*,” Finnemore mengeksplorasi bagaimana norma – norma sosial membentuk kepentingan nasional negara – negara. Ia berargumen bahwa kepentingan tidak bersifat tetap, melainkan terbentuk dan berubah melalui interaksi sosial. Penelitian ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam norma internasional dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, dengan memberikan contoh konkret dari kebijakan bantuan kemanusiaan dan intervensi militer yang didorong oleh norma – norma global. Dengan pendekatan konstruktivis, ia menunjukkan bahwa untuk memahami apa yang diinginkan oleh negara, penting untuk melihat ke dalam jaringan sosial dan

nilai – nilai yang membentuk persepsi dan preferensi mereka (Finnemore, n.d., Jung, 2019).

Finnemore menggunakan contoh – contoh dari organisasi internasional untuk mengilustrasikan bagaimana norma – norma ini berfungsi. Ia menganalisis peran UNESCO dalam mengubah definisi tentang ilmu pengetahuan, peran Palang Merah dalam penerimaan aturan Konvensi Jenewa, dan bagaimana Bank Dunia mendefinisikan pembangunan di negara – negara Dunia Ketiga. Melalui analisis ini, Finnemore menunjukkan bahwa organisasi internasional tidak hanya sebagai arena di mana kepentingan bersaing, tetapi juga sebagai agen sosial yang membentuk dan mengubah kepentingan negara (Finnemore, n.d.)

Salah satu kontribusi utama dari penelitian ini adalah penekanan pada pentingnya konteks sosial dalam menentukan kebijakan luar negeri. Finnemore berargumen bahwa perubahan dalam norma internasional dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam perilaku negara, karena negara – negara terintegrasi ke dalam jaringan sosial yang lebih luas yang mempengaruhi keputusan mereka. Dengan demikian, kepentingan nasional menjadi lebih dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan norma – norma sosial (Finnemore, n.d.).

Dalam artikel “Let’s Argue! Communicative Action in World Politics” karya Thomas Risse pada tahun 2000. Menginvestigasi bagaimana komunikasi dan dialog antar aktor internasional dapat membentuk norma – norma baru dan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Risse berargumen bahwa proses delibratif dapat menghasilkan konsensus di antara negara – negara tentang isu – isu kritis, seperti Hak Asasi Manusia dan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana konstruktivisme tidak hanya menjelaskan perubahan tetapi juga menawarkan mekanisme untuk mencapainya melalui interaksi sosial. Risse menekankan bahwa tindakan komunikatif tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap identitas dan kepentingan masing – masing pihak. Dalam konteks ini, negara – negara diharapkan untuk terlibat dalam diskusi yang jujur dan terbuka, di mana mereka dapat menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka tanpa rasa takut akan

konsekuensi negatif. Dengan cara ini, proses diplomasi menjadi lebih inklusif dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Poin penting dalam penelitian ini adalah bahwa tindakan komunikatif dapat membantu membangun kepercayaan antara negara – negara. Kepercayaan ini sangat penting dalam mengurangi ketegangan dan mencegah konflik. Risse menunjukkan bahwa ketika negara – negara terlibat dalam dialog yang produktif, mereka cenderung lebih mampu untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini juga menciptakan lingkungan di mana negara – negara dapat bekerja sama dalam isu – isu global seperti perubahan iklim, keamanan, dan perdagangan. Risse juga membahas tantangan yang di hadapi dalam praktik tindakan komunikatif. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya dan nilai – nilai antara negara – negara . Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi aktor politik untuk memahami konteks budaya masing - masing dan berusaha untuk menemukan titik temu dalam komunikasi mereka (Risse, 2000).

Penelitian oleh Jutta Weldes pada tahun 1999, dalam karyanya “*Constructing National Interests: The United States and The Cuban Missile Crisis*” Weldes menganalisis bagaimana identitas nasional Amerika Serikat dibentuk selama Krisis Rudal Kuba. Ia menunjukkan bahwa pemahaman tentang “musuh” dan “teman” sangat dipengaruhi oleh narasi yang dibangun melalui media dan politik. Penelitian ini menggambarkan bagaimana konstruktivisme dapat digunakan untuk memahami dinamika konflik internasional dengan menekankan peran ide dan narasi dalam membentuk kepentingan nasional. Weldes berargumen bahwa pemahaman tentang kepentingan nasional Amerika Serikat selama krisis ini lebih merupakan konstruksi diskursif daripada fakta objektif. Ia menunjukkan bahwa persepsi tentang ancaman yang di timbulkan oleh keberadaan misil Soviet di Kuba di bentuk melalui narasi dan frasa standar yang berulang, yang menjadikan pandangan tersebut diterima sebagai “*common sense*” dalam konteks politik saat itu. Dengan demikian, tindakan komunikasi dan retorika memainkan

peran penting dalam membentuk identitas negara dan kepentingan dalam kerangka perang dingin.

Melalui pendekatan ini, Weldes tidak hanya mengkaji tindakan pemerintah AS tetapi juga bagaimana identitas dan kepentingan negara lain didefinisikan ulang dalam konteks krisis tersebut. Ia menekankan bahwa proses ini memungkinkan untuk merumuskan kembali identitas, kepentingan, dan tindakan yang diharapkan dari berbagai negara, sehingga tampak logis bagi kepentingan nasional AS untuk menghapus misil dari Kuba.

Penelitian oleh Vinsensio Dugis pada tahun 2018, dalam artikel berjudul “Teori Hubungan Internasional: Perspektif – Perspektif Klasik,” Dugis menganalisis bagaimana teori- teori klasik dalam hubungan internasional dapat diterapkan untuk memahami fenomena empiris yang kompleks. Penelitian ini menanamkan pentingnya penggunaan metode empiris yang kompleks. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan metode empiris dalam studi hubungan internasional untuk menjelaskan interaksi antar negara, kebijakan luar negeri. Dengan menggunakan pendekatan empiris, Dugis menunjukkan bahwa teori – teori klasik seperti realisme dan liberalisme tetap relevan dalam menjelaskan dinamika hubungan internasional. Selain itu, Dugis membahas liberalisme, yang menawarkan pandangan alternatif terhadap realisme.. Teori ini menekankan pentingnya kerja sama antara negara melalui institusi internasional, perdagangan bebas, dan nilai – nilai demokrasi. Dalam konteks globalisasi, liberalisme dianggap lebih mampu menjelaskan fenomena seperti integrasi ekonomi regional dan peran organisasi internasional seperti PBB. Dugis menyoroti bagaimana liberalisme memberikan optimisme terhadap kemungkinan perdamaian yang berkelanjutan (Dugis, 2018).

Dugis juga memperkenalkan konstruktivisme, sebuah pendekatan yang lebih baru dibandingkan dengan realisme dan liberalisme. Konstruktivisme menekankan peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku negara. Teori ini melihat hubungan internasional bukan hanya sebagai hasil dari struktur

material tetapi juga interaksi sosial yang melibatkan persepsi dan konstruksi makna oleh aktor – aktor global.(Dugis, 2018)

Di dalam bab ini, seluruh artikel yang di review memiliki titik temu pada pembahasan mengenai kebijakan *War On Drugs* di Filipina yang di mulai sejak 2016. Persamaan yang terlihat adalah fokus pada dampak kebijakan ini terhadap hak asasi manusia, khususnya terjadinya pembunuhan di luar proses hukum yang melibatkan aparat penegak hukum. Semua artikel menyoroti bagaimana kebijakan ini secara sistematis menargetkan kelompok masyarakat miskin, serta menimbulkan ketakutan dan trauma di tengah masyarakat.

Selain itu, artikel – artikel tersebut juga sama – sama menyoroti lemahnya akuntabilitas pemerintah dan aparat penegak hukum. Mereka mengkritik impunitas yang terjadi, di mana pelaku pelanggaran jarang diadili atau di hukum. Seluruh artikel juga menggarisbawahi pentingnya peran komunitas internasional dalam menekan pemerintah Filipina untuk menghentikan pelanggaran HAM dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya.

Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fokus masing – masing artikel, Artikel yang di tulis oleh *Human Rights Watch* misalnya, lebih menekankan pada data statistik korban, kronologi kebijakan, serta upaya advokasi dari organisasi internasional. Sementara itu, artikel lain seperti karya Kathleen Barera, yang memberikan perhatian khusus pada dampak kebijakan terhadap anak – anak dan pelanggaran hak – hak anak menurut hukum internasional. Di sisi lain, *Amnesty Internasional* lebih banyak membahas kelemahan sistem penegakan hukum dan kurangnya transparansi dalam investigasi pemerintah.

Perbedaan lain juga terlihat dari sudut pandang yang digunakan. Beberapa artikel menyoroti aspek sosial – politik dan perubahan perilaku masyarakat akibat kebijakan ini, sedangkan yang lain lebih menekankan pada analisis hukum internasional dan relevansi konvensi HAM global. Ada pula yang fokus pada respons sipil lokal dan peran media dalam mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi.

Pembahasan di semua artikel sepakat dalam memberikan kritik terhadap kebijakan *War On Drugs* yang dinilai diskriminatif, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan HAM. Rekomendasi yang di berikan pun serupa, yaitu perlunya investigasi independen, penghentian praktik, serta pemberian keadilan dan reparasi bagi korban. Penekanan juga diberikan pada pentingnya kolaborasi antara organisasi HAM, komunitas internasional, dan masyarakat sipil lokal untuk mendorong perubahan kebijakan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi berbagai perspektif yang belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Kajian ini tidak hanya membandingkan data dan kebijakan, tetapi juga mengulas perubahan pola pelaksanaan kebijakan dari era Duterte ke pemerintahan berikutnya, serta menyoroti pergeseran narasi dari pendekatan represif ke pencegahan dan rehabilitasi. Selain itu, kajian ini menekankan pentingnya advokasi lintas aktor dalam mendorong perlindungan HAM yang lebih efektif.